

# PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL BORDIR DI KABUPATEN KUDUS

Oleh : Sumidi

## ABSTRACT

*This research is aimed at describing marketing patterns, financial condition, manpower quantity and quality, raw material availability and technology at embroidery small scale industry in Kudus Regency. This research was done by using survey method, enriched with qualitative analysis using in-depth interview. Research findings show that this industry is still using simple development patterns, proved by its marketing which still relies on third party, limited capital which hampers development efforts, limited innovation capability, and limited technology causing limited production volume. However, this research finds that skill and raw material availability are satisfactory. Therefore, it is recommended that facilitation or guidance from the government is still needed in order to empower this industry.*

**Keywords :** Empowerment, Facilitation

## A. PENDAHULUAN

Industri kecil bordir di kabupaten Kudus meskipun sudah lama memperoleh perhatian dan dukungan dari pihak Pemerintah Daerah, namun hasilnya belum menggembirakan atau belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kudus.

Kondisi lemahnya industri kecil bordir nampak dari fenomena lambannya perkembangan industri kecil bordir di Kudus pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu: (a) Pertambahan unit kerja hanya sebanyak 6 unit; (b) Pertambahan serapan tenaga kerja hanya 153

orang; (c) Nilai investasi bertambah Rp 3.766.566,22; dan (d) Nilai produksi bertambah 34.250.741 unit.

Banyak faktor yang menyebabkan kenapa pemberdayaan yang dilakukan oleh Kantor Perindag untuk memperdayakan industri kecil bordir yang ada di kabupaten Kudus belum berhasil. Secara umum, kekurangberhasilan masih nampak dari segi penambahan jumlah pengusaha, tenaga kerja, penambahan modal kerja/nilai investasi, dan nilai produksi tergolong lamban. Di lain pihak Pemerintah Daerah kabupaten Kudus bersama Dinas Perindag Propinsi telah memberikan bantuan modal usaha, bimbingan teknis

produksi, bimbingan, dan pembinaan dalam ekspansi pemasaran hasil dan fasilitasi lainnya.

Fenomena lain yang menunjukkan lemahnya perkembangan industri kecil bordir di kabupaten Kudus menurut penuturan pengusaha bordir, diantaranya: (1) Disain bordir kurang bervariasi; (2) Terbatasnya pangsa pasar (relatif masih bersifat lokal dan regional); (3) Penggunaan teknologi produksi yang relatif tidak berubah; dan (4) Sedikitnya pengembangan teknologi industri tepat guna oleh para pengusaha.

Sementara itu menurut laporan Dinas Perindag Kudus (2002), terdapat himpitan karakteristik industri kecil yang hampir seragam di berbagai tempat antara lain :

1. Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara administrasi dan produksi;
2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga perbankan;
3. Lemahnya struktur permodalan;
4. Lemahnya manajemen usaha dan belum meratanya tingkat ketrampilan pengrajin;
5. Keterbatasan informasi pasar;
6. Rendahnya mutu produksi;
7. Peralatan masih sederhana.

Hambatan pengembangan industri kecil bersifat multidimensional. Hambatan tersebut secara pokok terkategori dalam hambatan internal perusahaan dan hambatan eksternal perusahaan.

Hambatan internal bersumber dari dalam perusahaan. Sementara hambatan eksternal bersumber di luar perusahaan atau di luar pengaruh pengusaha. Ada kesamaan antara hambatan yang diidentifikasi oleh teoritis, pelaku usaha dengan Dinas Perindag kabupaten Kudus meski dengan penyebutan, pengelompokan dan urutan yang berbeda. Secara teoritis masalah-masalah utama usaha kecil termasuk bordir adalah: pemasaran, finansial, SDM, bahan baku, dan teknologi (Tambunan, 2002). Dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pola pemasaran, kondisi finansial, sumberdaya, bahan baku dan teknologi yang berlaku pada industri kecil bordir di Kudus? dan (2) Bagaimana pola pendampingan yang tepat dikaitkan dengan faktor pemberdayaan industri kecil Bordir Kudus?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola pemasaran, kondisi finansial, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, kemudahan bahan baku serta penggunaan teknologi industri kecil bordir Kudus dan mengetahui kebutuhan dampingan pada ke lima aspek di atas sebagai masukan penyusunan pola pembinaan yang tepat oleh dinas pemerintah dalam pengembangan industri kecil bordir Kudus. sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : diperoleh penggambaran

yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan perajin bordir terkait dengan faktor pengembangan usahanya yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan penyusunan format pendampingan yang tepat.

Pengertian industri kecil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah “kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya”.

Dalam prakteknya, antar departemen dan badan pemerintah punya kriteria sendiri-sendiri yang berbeda dalam mendefinisikan UKM (Tambunan, 2002). Perbedaan tersebut terlihat pada Depperindag dan BPS. Depperindag mengukur Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan nilai investasi awal (aset), sedangkan BPS berdasarkan jumlah pekerja.

BPS (1998) membedakan antara industri kecil (IK), industri rumah tangga (IRT) dan industri menengah besar (IMB). IK adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha, sedangkan IRT adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling banyak 4 orang termasuk pengusaha. Dengan demikian, usaha tanpa pekerja (self employment unit) termasuk kategori ini. Sementara itu, IMB adalah unit

usaha yang memperkerjakan lebih dari 20 orang.

Pemberdayaan pengusaha industri kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Dalam kenyataan di lapangan banyak dijumpai kendala dalam rangka pemberdayaan pengusaha industri kecil, seperti tingkat kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha industri kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Upaya menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat selalu dilaksanakan oleh pemerintah yang memang berkewajiban membangun perekonomian masyarakat. Keberpihakan kebijakan pemerintah atas perekonomian kecil (rakyat) dapat dilihat pada masa pemerintahan transisi Presiden Habibie, dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. XVI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, khususnya pasal 5 berbunyi :

“Usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara”.

Permasalahan pengembangan industri kecil sangatlah beragam. Keragaman masalah ini bukan saja ditemui pada perbedaan produk, tetapi juga terkait lokasi, antar-sentra, antarsektor atau subsektor, atau pula antarunit usaha dalam kegiatan / sektor yang sama. Namun demikian, permasalahan umum secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu masalah internal (berasal dari dalam perusahaan sendiri) dan masalah eksternal (berasal dari luar atau di luar pengaruh pengusaha).

1). Masalah eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan industri kecil menurut Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Jawa Tengah Tahun 2001, meliputi : (1) Perundang-undangan; (2) Peraturan daerah; (3) Kondisi perekonomian; (4) Kondisi sarana prasarana; (5) Kondisi sosial budaya; (6) Kondisi politik; dan (7) Kondisi keamanan. Terkait masalah eksternal, Meredith (2002) menyebutkan sebagai sesuatu yang mungkin tidak dapat dikendalikan, namun pasti akan mempengaruhi strategi perencanaan usaha. Pengusaha mungkin tidak dapat menghindari pengaruhnya, tetapi dapat mengurangi dampaknya, bila dapat bertindak gesit dan efektif. Faktor-faktor luar yang dimaksud adalah : (1) Saluran distribusi; (2) Kondisi keuangan; (3) Pemasaran;

(4) Kompetisi; (5) Peraturan pemerintah; (6) Kecenderungan pasar; (7) Perkembangan teknologi dan (8) Pelanggan dan Undang-undang bisnis.

2). Kondisi internal

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Jawa Tengah Tahun 2001 mengidentifikasi faktor-faktor internal pengembangan industri kecil, meliputi :

- a. Kewirausahaan;
- b. Pemasaran;
- c. Produksi / teknologi;
- d. Keuangan;
- e. Modal usaha;
- f. Bahan baku;
- g. Tenaga kerja.

Sementara itu, Tulus T.H. Tambunan (2002) telah mengidentifikasi beberapa kendala utama pengembangan industri kecil secara internal, yang meliputi modal kerja, dan atau modal investasi, kesulitan bahan baku, keterbatasan teknologi, SDM terutama manajemen dan teknisi, informasi pasar, dan kesulitan pemasaran. Untuk selanjutnya Tambunan membahas permasalahan industri kecil ini dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kesulitan pemasaran;
- b. Keterbatasan finansial;
- c. Keterbatasan SDM;
- d. Masalah bahan baku;
- e. Keterbatasan teknologi.

Untuk mencari indikator dari setiap faktor pengembangan

industri kecil tersebut berikut diuraikan berbagai hal tentang faktor-faktor pengembangan industri kecil di atas.

Pertama, kondisi pemasaran. Pemberdayaan industri kecil dalam bentuk pemasaran dimaksudkan untuk mendorong dan mendukung kegiatan pengembangan produk industri pasar ekspor, pasar regional, dan pasar lokal, dengan demikian dapat membantu para pengusaha industri dalam kelangsungan usahanya. James dan Akrasanee (Tambunan, 2002) melakukan studi lintas negara ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa salah satu aspek yang terkait pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pada pasar domestik dari produk serupa maupun pasar-pasar yang lebih tinggi. Kaitan daya saing pasar adalah kehandalan produksi dalam mempertahankan volume produksi maupun kualitas produksi. Kaitan lain dari hambatan pemasaran adalah kurangnya informasi tentang peluang pasar, termasuk standard-standard produk dan perdagangan. Sampai saat ini praktis semua perusahaan di Indonesia yang pernah mendapat sertifikat ISO dan sejenisnya umumnya dari kalangan Usaha Besar. Salah satu faktor produksi yang penting dalam usaha bordir adalah keberadaan *show room* pada sentra industri kecil bordir. Dengan *show room* tersebut para pelaku dengan mudah memilih barang atau melakukan transaksi

jual beli lebih baik lagi jika ditempatkan untuk memproduksi juga dilengkapi dengan *show room*, sebab jika ada pembeli yang kurang puas dengan produk yang sudah ada dapat memesan produk yang diinginkan. Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Jawa Tengah (Perindag Jateng dan Lemlit UNDIP, 2000) menyusun indikator pemasaran yang meliputi : (a) Pengetahuan tentang pasar; (b) Intensitas promosi; (c) Pencantuman merk dagang; dan (d) *Packing* (kemasan).

Kedua, keterbatasan finansial. Pada industri kecil bordir kabupaten Kudus, faktor modal mempunyai peranan penting dalam kegiatan produksi. Pengertian modal dalam ekonomi terdiri dari modal yang habis dalam sekali pakai. Modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari dan biaya dalam bentuk uang baik kas maupun membeli bahan, membayar tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan modal tetap adalah modal/aktiva yang tidak habis dalam sekali pakai, melainkan secara berangsur habis turut serta dalam proses produksi selama periode tertentu. Kendala utama yang banyak dialami oleh pengusaha industri kecil termasuk industri bordir adalah permodalan. Dengan kondisi modal yang sangat terbatas yang dimiliki oleh pengusaha bordir mereka mengalami hambatan dalam pengembangan usaha. Hambatan modal tersebut

diperberat dengan kesulitan mereka untuk mengakses tambahan modal dengan mengajukan kredit ke bank karena tidak adanya legalitas usaha dan tidak adanya agunan atau jaminan serta tidak adanya lembaga penjamin. Untuk mengeliminasi kendala modal ini Pemerintah Kabupaten Kudus telah menganggarkan bantuan modal melalui APBD setiap tahun. Tambunan mengemukakan dewasa ini usaha kecil Indonesia menghadapi dua aspek utama keuangan: mobilisasi modal awal (*star up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Meski umumnya modal awal berasal dari modal (tabungan) sendiri atau sumber modal informal, namun sumber ini umumnya tidak mencukupi untuk kegiatan produksi apalagi untuk investasi. Sementara modal dari perbankan masih belum dapat diandalkan usaha kecil. Oleh karena itu, meski sudah cukup banyak modal-modal pinjaman atau skim kredit dari perbankan atau BUMN, pendanaan dari sumber informal masih dominan dalam pembiayaan. Dari data yang dihadapi usaha kecil dalam pemanfaatan modal perbankan antara lain (Survai BPS 1998) selain memang tidak berminat pinjam uang bank juga karena ketiadaan agunan, alasan lainnya karena tidak tahu prosedur perbankan atau prosedur terlalu sulit dan makan waktu serta bunga bank yang relatif tinggi.

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Jawa Tengah (Perindag Jateng dan Lemlit UNDIP, 2000) menyusun indikator keuangan meliputi :(a) Jumlah modal usaha; (b) Struktur modal (kekayaan sendiri, pinjaman); (c) Pemanfaatan kredit; dan (d) Pembayaran pajak.

Ketiga, keterbatasan SDM kondisi utama dalam SDM di industri kecil dan industri rumah tangga adalah dalam aspek-aspek :

- a. *Entrepreneurship*;
- b. Manajemen;
- c. Teknik produksi;
- d. Pengembangan produk;
- e. *Engineering design*;
- f. *Quality controll*;
- g. Organisasi bisnis;
- h. Akuntansi;
- i. *Data processing*;
- j. Teknik pemasaran; dan
- k. Penelitian pasar.

Keahlian-keahlian dalam setiap aspek tersebut sangat diperlukan untuk memperluas dan mempertahankan kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, perluasan pangsa pasar dan menembus pasar baru. Pada umumnya diyakini pelatihan dapat menanggulangi masalah ini. Namun biaya pelatihan akan terasa berat bila diselenggarakan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk menyelenggarakan program-program pelatihan bagi pengusaha dan tenaga kerja usaha kecil. Namun demikian efektivitas pelatihan yang

pernah diberikan seringkali diragukan. Hal tersebut disebabkan:

- a. Pelatihan seringkali terlalu teoritis;
- b. Waktu terlalu singkat;
- c. Tidak ada tindak lanjut (mis, beberapa saat setelah latihan usai, pemberi latihan mengunjungi kembali pengusaha untuk mengetahui sejauhmana pelatihan dapat diterapkan dalam usahanya);
- d. Seringkali tidak cocok dengan kebutuhan mereka sebenarnya.

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Jawa Tengah (Perindag Jateng dan Lemlit UNDIP, 2000) menyusun indikator SDM sebagai berikut :

- a. Perencanaan tenaga kerja;
- b. Pembagian kerja;
- c. Pemberian *reward*;
- d. Pelatihan dan pengembangan SDM;
- e. Jumlah dan kecukupan tenaga kerja;
- f. Kualitas tenaga kerja.

Keempat, masalah bahan baku, keterbatasan bahan baku seringkali menjadi kendala serius dalam industri kecil. Kendala ini menjadi terasa jauh lebih berat selama masa krisis. Harga bahan baku menjadi tak terjangkau selain menjadi langka. Tidak sedikit unit-unit industri kecil kemudian mati atau beralih profesi karena kelangkaan dan ketidakterjangkauan harga bahan baku ini. Catatan

selama tahun 1998 sampai 2000 memperlihatkan pengusaha rokok kretek di Jawa Tengah dan Pekalongan menghentikan produksinya karena mahalnnya harga bahan baku. Indikator bahan baku ini meliputi :

- a. Kemudahan memperoleh bahan baku (darimana diperoleh bahan baku);
- b. Keterjangkauan harga bahan baku;
- c. Kualitas bahan baku;
- d. Sistem pengadaan bahan baku (rutin, sesuai pesanan, kalau ada produksi).

Kelima, keterbatasan teknologi. Pada umumnya UKM di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional atau mesin-mesin produksi manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak saja berakibat *total factor productivity* dan efisiensi dalam produksi, tetapi juga menjadikan rendahnya kualitas produk. Penyebab keterbatasan teknologi oleh Tambunan diidentifikasi antara lain karena:

- a. Keterbatasan dana investasi mesin produksi;
- b. Keterbatasan informasi tentang perkembangan teknologi mesin produksi baru;
- c. Keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru dan berinovasi dalam produk maupun proses produksi.

Rendahnya pemilikan atau penguasaan teknologi ini juga merupakan ancaman IK dalam

persaingan bebas. Program peningkatan kemampuan teknologi, pemberdayaan teknologi, dan produksi dimaksudkan untuk mendorong agar pengusaha industri kecil mempunyai kemampuan dibidang teknologi serta lebih mampu dalam peningkatan atau penciptaan nilai tambah sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mewujudkan produktivitas serta efisiensi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk dapat mengembangkan industri kecil bordir paling tidak harus terpahami kelima dimensi pengembangan tersebut.

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) merupakan sumber dan inspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa "Pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat".

David C. Korten (1984) mengemukakan teori pelembagaan program dengan menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan

adaptabilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (*beneficiaries*), program itu sendiri, dan organisasi yang melaksanakan program.

Menurut Korten (1984), program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila tidak ada hubungan erat / sinergis antara kebutuhan pihak penerima program dengan hasil-hasil program, persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana. Jadi untuk keberhasilan suatu program pengembangan industri kecil diperlukan: pertama, adanya kesesuaian antara kebutuhan pengusaha dan pengrajin dengan hasil pelaksanaan program; kedua, adanya kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana, atau sejauhmana kemampuan organisasi pelaksana dampingan program mengelola atau memenej program bantuan / darningannya; dan ketiga, kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana.

Menurut teori *Stimulus – Needs -Respon* (S-N-R), kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Kudus (Stimulus) akan mempengaruhi kebutuhan/keinginan (*needs*) para pengusaha bordir, manakala stimulus yang diberikan oleh Disperindag sesuai dengan kebutuhan pengusaha, maka akan timbul respon positif dari pengusaha, sehingga peluang pemberdayaan pengusaha bordir yang dilakukan oleh Disperindag akan berhasil.

Pada tingkatan teori menengah (*middle range theory*) permasalahan dapat dianalisis dengan menggunakan *Fit theory* atau teori kecocokan dari Korten dalam buku Tjokrowinoto (1989) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program dalam hal ini kegiatan pemberdayaan pengusaha bordir yang dilakukan oleh Disperindag manakala sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat mampu melakukan program/kegiatan, dan terlibat dalam penyusunan program/kegiatan. Berdasarkan kajian teori di atas terlihat jelas bahwa tingkat keberhasilan/perkembangan industri kecil bordir dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh Pemda dengan kebutuhan para pengusaha bordir. Pemberdayaan atau empowerment merupakan salah satu strategi atau paradigma pembangunan yang diimplementasikan dan dikembang-

kan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan berupaya untuk mengolah kondisi yang serba sentralistik ke situasi yang lebih otonom dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri (Loekman Soetrisno, 1995).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang diperkaya dengan metode pengumpulan data kualitatif. Tipe penelitiannya deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan pola pengembangan industri kecil bordir. Adapun variabel dan indikator penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Variabel, Dimensi, dan Indikator Penelitian**

**1. Identifikasi Faktor Pengembangan Industri (kuantitatif)**

VARIABEL	INDIKATOR
PEMASARAN	(1). Saluran distribusi a. produsen – pengecer – konsumen, atau b. produsen – konsumen) (2). Jangkauan pemasaran (lokal, regional, nasional, internasional) (3). Sumber desain (dari perusahaan sendiri, pemesan/buyer, gabungan berbagai sumber) (4). Media Promosi (5). Merk Dagang (6). Kemasan
KEUANGAN	(1). Besar modal awal (2). Struktur modal (3). Kebutuhan modal kerja (4). Kebutuhan modal investasi (5). Kemudahan mengakses sumber modal
SUMBERDAYA MANUSIA	(1). Ketercukupan jumlah pegawai (manajerial & teknis) (2). Kualitas pegawai tingkat manajerial (3). Ketrampilan kerja pegawai (4). Perencanaan tenaga kerja (5). Kejelasan Pembagian Kerja (6). Pemberiaan penghargaan (7). Pelatihan
BAHAN BAKU	(1). Kemudahan mencari bahan baku (2). Keterjangkauan harga bahan baku (3). Kualitas Bahan baku di pasaran (4). Sistem pengadaan bahan baku (rutin/ pesanan)
TEKNOLOGI	(1). Jenis dan jumlah alat produksi yang dimiliki (2). Kecanggihan / kememadaian alat dibandingkan permintaan pasar (3). Tingkat penguasaan alat baru (4). Perencanaan pengadaan alat baru

Sumber : Proposal penelitian.

Sementara untuk identifikasi kebutuhan dampingan terangkum dalam tabel 2 berikut :

**Tabel 2. Identifikasi Kebutuhan Dampingan (Harapan dan Kenyataan) Kualitatif**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BORDIR	1. Pelibatan dalam perumusan kebijakan pemerintah.	1) Kelibatan dalam kegiatan perumusan kegiatan instansi pendamping. 2) Intensitas diminta masukan oleh instansi pendamping 3) Intensitas memberi masukan atau meminta dampingan pada instansi pendamping
	2. Pembelajaran dan pemampuan masyarakat dalam berbagai aspek	1) Pembelajaran dalam pencarian dan pemupukan permodalan 2) Pembelajaran dalam teknologi industri 3) Pembelajaran dalam pemasaran
	3. Kelangsungan usaha	1) Tingkat pengembangan usaha yang dilakukan 2) Tingkat keseriusan dalam memperbaiki posisi tawar dengan berbagai pihak 3) Tingkat keseriusan dalam pengusahaan regenerasi usaha
	4. Peran pemerintah	1) Tingkat kebutuhan dampingan dari 2) Pemerintah 3) Tingkat kemandirian akibat dampingan dari pemerintah 4) Tingkat ketergantungan pada dampingan pemerintah

Sumber : Data primer penelitian

Besar sampel dan pemecahan unsur sampel terlihat dalam tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Populasi dan Sampel**

NO	KECAMATAN	DESA SENTRA	POPULASI	SAMPEL (30 %)
1	KOTA	1. LANGGAR DALEM 2. JANGGALAN 3. KAJEKSAN 4. DEMANGAN	6 UNIT 18 UNIT 30 UNIT 12 UNIT	2 UNIT 6 UNIT 10 UNIT 4 UNIT
2	GEBOG	1. KARANGMALANG 2. PADURENAN	29 UNIT 18 UNIT	10 UNIT 6 UNIT
	JUMLAH		113 UNIT	38 UNIT

Sumber : Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Kudus, tahun 2003.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4 . Pola dan Identifikasi Kebutuhan Dampingan

NO	VARIABEL	POLA	KEBUTUHAN DAMPINGAN
1	<b>PEMASARAN :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. titip barang</li> <li>2. berdasar pesanan</li> <li>3. bila sepi setor ke pengecer</li> <li>4. langsung pada pembeli yang datang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. hak memperoleh informasi dampingan pasar (pameran) bagi semua perajin besar dan terutama yang kecil</li> <li>2. Fasilitasi majalah desain bordir (masih mahal)</li> </ol>
		<p>Jangkauan pasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokal</li> <li>2. regional / nasional (Kota-kota besar jawa dan luar jawa)</li> <li>3. lewat perantara ke Luar Negeri (Brunei dan Malaysia)</li> </ol>	Diperlukan fasilitasi yang lebih terbuka kepada semua perajin (bukan hanya pada perajin / pengusaha tertentu saja) dalam informasi pasar dan pameran.
		<p>Sumber desain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. desain sendiri</li> <li>2. tiru desain yang ngetren</li> <li>3. modifikasi contoh</li> <li>4. pemesan</li> </ol> <p>Media promosi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembeli</li> <li>2. sesama pedagang</li> <li>3. pameran</li> </ol> <p>Merk dagang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bermerk</li> <li>2. belum</li> </ol> <p>Kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sudah punya</li> <li>2. belum</li> </ol> <p>Keindahan kemasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biasa</li> <li>2. lumayan</li> </ol>	<p><b>Usulan Pola Pendampingan.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya transparansi /keterbukaan dalam pola pendampingan. Industri bordir yang kecil pun mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi dan sosialisasi dalam mendapatkan modal, mengikuti pameran, pengetahuan pasar/pemasaran dan mendapatkan pelatihan dari instansi yang terkait. Jangan hanya untuk industri bordir yang sudah besar saja.</li> <li>2. Dibantu dalam pembuatan desain merk dagang yang semenarik mungkin.</li> </ol>
2	<b>Finansial</b>	<p>Modal awal : Meningkat</p> <p>Komposisi modal : 50 % modal pinjaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan pinjaman modal usaha yang tidak memberatkan dan dengan bunga yang rendah, mungkin sampai 0 % (fleksibel)</li> </ol>

3	<b>Sumberdaya Manusia</b>	Tingkat ketrampilan bagus, lemah pada inovasi desain	1. Perlu pelatihan desain 2. Informasi desain (majalah)
4	<b>Bahan Baku</b>	Membeli dari sumber lokal (sudah mencukupi)	-
5	<b>Teknologi</b>	Ada 2 jenis teknologi produksi : 1. mesin manual 2. mesin bordir JUKI	1. Diperlukan penguasaan dan pemilikan mesin bordir dengan komputer. 2. Diperlukan pelatihan peningkatan teknologi manajemen umum (produksi, kemasan, pemasaran dsb)

Sumber : Data penelitian primer

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) merupakan sumber dan inspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa “pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat”.

David C. Korten (1984) mengemukakan teori pelebagaan program dengan menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptabilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang

dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (*beneficiaries*), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program.

Dengan mendasarkan pada pendapat Korten (1984), pemberdayaan masyarakat bordir hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu kesesuaian antara kebutuhan perajin dengan program dampingan instansi pemerintah (banyak kebutuhan praktis yang tidak bisa difasilitasi karena keterbatasan sifat program dampingan yang sering terbatas konsep proyektal, bukan dampingan berkelanjutan) dan kesesuaian antara organisasi pendamping dengan cakupan tugas pendampingan. Diperlukan kecermatan di dalam analisis tupoksi dan kelengkapan perangkat organisasi dinas pendamping (Kantor Perindagkop) dengan kebutuhan dampingan yang lebih intensif. Pada saat ini pendampingan diwadahi Seksi Pengembangan Industri.

Namun, dalam pelaksanaan belum dilaksanakan secara maksimal.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

a. Di bidang pemasaran pada umumnya para pengrajin/pengusaha menggunakan pola pemasaran dengan menitipkan barang, kemudian melalui pesanan. Sedangkan bila sedang sepi mereka menyetorkan hasil produknya ke pengecer atau langsung kepada pembeli yang datang. Hasil produk bordir lebih banyak dijual di pasaran lokal dan nasional/regional, namun ada juga yang mampu mencapai ke pasaran internasional melalui perantara. Desain produk industri bordir pada umumnya diperoleh pengusaha melalui desain sendiri, meniru desain yang sedang ngetrend dan modifikasi contoh dari pemesan. Finansial, pada umumnya modal awal meningkat untuk pengembangan usaha. Sementara itu modal yang diputar sebesar 50 % umumnya bukan modal sendiri. Hal ini berarti masih diperlukannya bantuan modal dari pihak lain. Namun demikian sistem perkreditan yang ada sampai saat ini belum dapat mereka akses karena berbagai hambatan. Sumber Daya Manusia, pada umumnya untuk tenaga terampil bordir cukup memadai namun masih ada kelemahan pada

rendahnya inovasi desain. Bahan Baku, pada umumnya bahan baku diperoleh dari supplier lokal. Secara umum tidak ditemukan hambatan didalam pengadaan bahan baku. Teknologi, pada umumnya para pengusaha/pengrajin industri kecil bordir menggunakan 2 (dua) jenis teknologi produksi, yaitu mesin manual dan mesin bordir juki. Namun para pengusaha masih memerlukan penambahan mesin bordir dengan teknologi komputer untuk memenuhi permintaan pasar.

b. Diperlukan model pendampingan yang mempertimbangkan 3 (tiga) faktor kelayakan program yang meliputi organisasi pendamping, penerima bantuan, dan isi program. Dengan demikian identifikasi kebutuhan yang diungkapkan oleh para pengrajin hendaknya menjadi pertimbangan agenda program pendampingan bagi instansi pembina.

### **2. Saran**

Model pendampingan hendaknya mempertimbangkan kesesuaian antara 3 (tiga) komponen kelayakan program yaitu: (a) Kesesuaian antara kebutuhan perajin dengan program dampingan instansi pemerintah (banyak kebutuhan praktis yang tidak bisa difasilitasi karena keterbatasan sifat program dampingan yang sering terbatas

konsep proyektal, bukan dampingan berkelanjutan); (b) Kesesuaian antara organisasi pendamping dengan cakupan tugas pendampingan. Diperlukan kecermatan di dalam analisis tupoksi dan kelengkapan perangkat organisasi dinas pendamping (Kantor Perindagkop) dengan kebutuhan dampingan yang lebih intensif. Pada saat ini pendampingan diwadahi Seksi Pengembangan Industri. Namun, dalam pelaksanaan belum dilaksanakan secara maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AMW, Pranaka. & Onny S. Prijono, ed. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Korten, David C. 1993. *Menuju Abad 21: Tindakan Suka Rela dan Agenda Global*, terjemahan Lilian Teja Sudhana. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
- Korten, David C. 1984. *People Centered Development. Contributions toward Theory and Planning Frameworks*. Connecticut : Kumarian Press.
- Lemlit UNDIP. 2000. *Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah*.
- Lexy, J. Moleong. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roesdakarya.
- Miles, B. Mathew. 1994. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, B. Mathew. & Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kuantitatif*, terjemahan Cecep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Moeljarto, Tjokrowinoto. 1993. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Moeljarto, Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Emil. 1992. *Pembangunan Berkelanjutan : Keperluan Penerapannya di Indonesia, dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Mencari Format Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama bekerjasama dengan Yayasan SPES.

Schumacher. 1973. *Small is Beautiful, Blond and Bridges*. London, England.

Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soetrisno, Loekman. 1995. *Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Anggito Abimanyu, dkk). Yogyakarta: PAU-SE UGM bersama BPFE UGM.

Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta, Rineka Cipta.

Wiratno, Tatang. & Antonius Tarigan. 2002. "Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal". *Jurnal Perencanaan Pembangunan*. No. 29. Juli-September. Jakarta: Bappenas.